

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2012: 29), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Subandi (2011: 15) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang pesat secara terus-menerus memungkinkan negara-negara industri maju memberikan segala sesuatu yang lebih kepada warga negaranya, sumberdaya yang lebih banyak untuk perawatan kesehatan dan pengendalian polusi, pendidikan universal untuk anak-anak, dan pensiun public

Menurut Boediono (1997 : 5) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dari pengertian di atas dapat dilihat ada 3 aspek yaitu proses output perkapita. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, diaman perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, yaitu output total dibagi jumlah penduduk jadi proses kenaikan output perkapita, tidak bisa tidak

harus dianalisis jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di suatu pihak dan jumlah penduduk di pihak lain. Pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang, kenaikan output perkapita selama satu atau dua tahun yang kemudian diikuti dengan penurunan output perkapita, bukan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan output perkapita tidak memerlukan suatu proses jangka panjang.

Simon (2012) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka Panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis negara bersangkutan (M.L Jhingan, 2012).

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi (GNP) perkapita adalah sebagai berikut:

$$G_{gnp} = \frac{GNP_n - GNP_{n-1}}{GNP_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana:

G_{gnp} = Tingkat pertumbuhan ekonomi.

GNP_n = GNP tahun berikutnya.

GNP_{n-1} = GNP tahun lalu.

2.1.1.2 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi, merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya

laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011:332) ada lima faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

2. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

3. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal

merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa ke arah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa ke arah penggalian sumber alam, industrialisasi, dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian ke arah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Disamping faktor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang telah dijelaskan di atas, menurut Jhingan (1999) terdapat pula beberapa faktor non ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu:

a. Faktor Sosial

Di negara terbelakang terdapat tradisi sosial dan budaya yang tidak menunjang perkembangan ekonomi, misalnya sikap orang yang menyerah kepada takdir dan tidak suka kerja keras, lebih menghargai waktu senggang, kesenangan, pesta-pesta dan adat kebiasaan. Dengan begitu masyarakat menghabiskan uang kepada usaha-usaha non ekonomi. Dengan kata lain, pandangan budaya bertentangan dengan pembangunan ekonomi.

Demi kemajuan ekonomi suatu daerah maka diperlukan perubahan pada Lembaga terkait sehingga tabungan dapat lebih di tingkatkan dan dapat dialihkan menjadi modal yang produktif. Dengan demikian maka perlu didirikan Lembaga keuangan negeri maupun swasta seperti bank tabungan, bank investasi, bursa modal dan lain-lain. Sementara itu untuk menutupi kekurangan di bidang manajer, ilmuwan, administrator dan ahli lainnya Lembaga-lembaga tersebut harus di dirikan untuk mendidik dan melatih mereka, namun masalah yang pelik dihadapi yakni upaya untuk meningkatkan jumlah wiraswasta. Upaya tersebut tidak bergantung pada Lembaga apapun tetapi kepada seluruh lingkungan negara tersebut.

b. Faktor Manusia

Faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sumber daya manusia. Dimana pertumbuhan ekonomi sendiri tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya manusianya saja tetapi juga lebih kepada efesiensinya. Jumlah penduduk yang meningkat tajam bisa menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi. Dengan pembentukan modal dan pendapatan perkapita yang rendah membuat suatu negara semakin sulit untuk menopang pertumbuhan jumlah penduduk tersebut.

Dengan begitu, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dapat menggunakan sumber daya manusia secara tepat dengan cara berikut. Yang pertama adalah harus adanya pengendalian perkembangan penduduk. Hal ini juga dapat dilakukan dengan program keluarga berencana dan penelitian atas penduduk untuk menurunkan angka kelahiran. Yang kedua adalah dengan adanya perubahan pandangan tenaga buruh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas buruh agar menerima arti penting dan martabat buruh. Hal ini diperlukan perubahan faktor kelembagaan dan sosial. Dimana peran Pendidikan sangat penting karena hanya tenaga buruh yang terdidik dan terlatih dengan tingkat efisiensi yang tinggi yang dapat membawa masyarakat kepada pembangunan ekonomi yang pesat.

c. Faktor Politik dan Administratif

Penghambat besar dalam suatu pembangunan ekonomi adalah struktur politik dan administrasi yang lemah. Professor Lewis berpendapat bahwa dalam merangsang dan mendorong ekonomi tindakan pemerintah memiliki peran yang penting. Dimana stabilitas, ketertiban dan adanya perlindungan hukum mendorong kewiraswataan, dengan adanya pasar yang luas, mobilitas faktor dan kemajuan teknologi dapat membantu merangsang usaha dan inisiatif. Hal itu dapat dicapai jika administrasi yang bersih dan kondisi politik yang stabil.

2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Terkait pertumbuhan ekonomi, tentunya banyak teori dan pendapat dari beberapa ahli ekonomi mengenai pengertian dan apa saja indikator utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa teori dari para ahli ekonomi yang mengemukakan pendapat tentang pertumbuhan ekonomi:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

a. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap pertumbuhan yang berurutan dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan terakhir adalah tahap perindustrian. Berdasarkan teori ini pertumbuhan masyarakat dimulai dari masyarakat tradisional menuju tahap masyarakat modern yang kapitalis. Lewat analisa tersebut Adam Smith beranggapan bahwa tenaga kerja adalah salah satu unsur yang berperan dalam suatu kegiatan menghasilkan barang atau produksi.

Pembagian kerja secara khusus menjadi bahasan pokok dalam analisa tersebut dalam rangka meningkatkan output yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Teori ini yang kemudian dikenal sebagai spesialisasi kerja menurut Adam Smith. Spesialisasi tersebut melibatkan faktor-faktor lain yang ikut berperan dalam pencapaian target yaitu peningkatan keterampilan kerja dan penemuan alat-alat produksi yang dapat mengurangi pemborosan energi para pekerja.

Pengkhususan tugas yang dilakukan tersebut dapat terlaksana pada fase dimana sistem perekonomian yang dilakukan adalah sistem kapitalis dan modern. Hasil yang didapat akan terlihat signifikan dan terjadi secara serentak, dimana terdapat sinergi satu sama lain menurut Adam Smith. Penambahan hasil yang terlihat pada satu bagian akan mendorong terjadinya peningkatan investasi, meningkatkan spesialisasi, ditemukannya teknologi yang lebih modern, dan ekspansi wilayah penjualan. Proses pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dimana pada akhirnya terkendala oleh sumber daya alam yang ada dan terbatas. Pada akhirnya proses pertumbuhan itu sendiri akan mengalami

perlambatan pada saat sumber daya alam tidak lagi tersedia untuk suatu aktivitas ekonomi yang harus terus berjalan sementara sumber daya yang ada sudah menipis bahkan lama kelamaan habis.

Tahap-tahap pembangunan tersebut terjadi dengan asumsi awal bahwa situasi pasar dimana tahapan tersebut berlangsung adalah pasar dimana didalamnya berlangsung persaingan secara alami yang dikenal dengan pasar persaingan sempurna. Adapun karakteristik pasar tersebut adalah :

- 1) Di dalamnya banyak pembeli serta penjual yang bertransaksi.
- 2) Barang yang ditawarkan jenisnya sama.
- 3) Masing-masing baik pembeli ataupun penjual tidak memiliki itikad buruk atau kerjasama yang merugikan
- 4) Setiap unsur yang ada di dalam pasar tersebut memiliki bergerak secara cepat.
- 5) Situasi pasar dan segala seluk beluk mengenai kondisi pasar diketahui secara rinci baik oleh pembeli maupun penjual.

b. Teori Pertumbuhan David Ricardo

Teori ini merupakan teori pengembangan dari teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Adam Smith, dimana perpacuan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk dan dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai keadaan yang stasioner.

Dalam hal ini Ricardo menyatakan bahwa jumlah penduduk ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku. Jika tingkat upah diatas upah yang disebutnya pas-pasan untuk hidup maka orang merasa hidup sejahtera dan akan menambah jumlah anak,

sementara jika tingkat upah dibawah tingkat upah yang pas-pasan maka jumlah penduduk akan turun. Dalam jangka panjang tingkat upah akan cenderung sama dengan tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup sehingga tidak ada dorongan untuk bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Oleh karena itu Ricardo mengasumsikan dalam jangka panjang jumlah penduduk akan konstan, karena output tergantung pada jumlah penduduk maka diperkirakan dalam jangka panjang output nasional akan cenderung tumbuh konstan, sehingga pendapatan perkapita akan konstan.

c. Teori Pertumbuhan Thomas Robert Malthus

Menurut Thomas Robert Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan, tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibaring dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi.

Menurut Thomas Robert Malthus, perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus, disamping itu adanya perkembangan ekonomi dapat diharapkan bila terdapat tabungan yang digunakan untuk investasi. Sedangkan menurut J.B.Say berkembang dengan hukum pasar, dimana dikatakan bahwa *Supply Creates its own demand* yang artinya asal jumlah produksi bertambah maka secara otomatis permintaan akan ikut bertambah pula karena pada hakekatnya kebutuhan manusia tidak terbatas.

Jadi kesimpulannya, bahwa tabungan disamping sebagai pendorong bagi perkembangan ekonomi yaitu sebagai sumber capital, juga dapat sebagai penghambat perkembangan bagi perkembangan ekonomi karena hal ini dapat memperkecil jumlah permintaan efektif.

d. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan sebagai berikut:

- 1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh.
- 2) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional.
- 3) Rasio modal-produksi (*capital-output ratio*) tetap nilainya.
- 4) Perekonomian terdiri dari dua sektor.

Dalam teori Harrod-Domar tidak diperhatikan syarat untuk mencapai kapasitas penuh apabila ekonomi terdiri dari tiga sektor atau empat sektor. Walau bagaimanapun berdasarkan teorinya di atas dengan mudah dapat disimpulkan hal yang perlu berlaku apabila pengeluaran agregat meliputi komponen yang lebih banyak, yaitu meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dalam keadaan yang sedemikian, barang-barang modal yang bertambah dapat sepenuhnya digunakan apabila $AE_1 = C + I_1 + G_1 + (X - M)_1$, sama dengan $(I + \Delta I)$.

Analisis diatas dapat pula disimpulkan bahwa analisis Harrod-Domar merupakan pelengkap kepada analisis Keynesian. Dalam analisis Keynesian dapat diperhatikan

adalah persoalan ekonomi jangka pendek. Manakala teori Harrod-Domar memperhatikan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui analisis Harrod-Domar dapat dilihat bahwa dalam jangka panjang bahwa pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila $I + G + (X-M)$ terus menerus bertambah dengan tingkat yang menggalakkan.

Menurut Adisasmita (2013: 62), teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari Keynes. Mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak menyinggung persoalan mengatasi masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pada hakikatnya, teori Harrod-Domar berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau *Steady Growth*, merupakan pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal akan selalu berlaku dalam perekonomian. Harrod-Domar tetap mempertahankan pendapat dari ahli-ahli terdahulu yang menanamkan tentang peranan pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Teori Harrod-Domar memperhatikan fungsi dari pembentukan modal (yang tidak diberikan perhatian oleh kaum klasik) dan tingkat pengeluaran masyarakat (Keynes lebih menekankan pada kekurangan pengeluaran masyarakat). Teori Harrod-Domar bersesuaian pendapat Keynes yang menganggap bahwa penambahan dalam kesanggupan memproduksi tidak sendirinya akan menciptakan penambahan produksi dari kenaikan pendapatan nasional. Harrod-Domar sependapat dengan Keynes bahwa penambahan produksi dan pendapatan nasional bukan oleh pendapatan dalam

kapasitas memproduksi tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercapai apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan pada masa sebelumnya. Bertitik tolak dari pandangan ini, analisis Harrod-Domar bertujuan untuk menunjukkan panjang kemampuan masyarakat yang bertambah dari masa ke masa (yang diakibatkan oleh pembentukan modal pada masa sebelumnya) akan selalu sepenuhnya digunakan.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Model pertumbuhan neoklasik menjelaskan tentang *output* homogen tunggal yang diproduksi oleh dua jenis input, yaitu modal dan tenaga kerja. Unsur-unsur baru dari model pertumbuhan neoklasik adalah modal dan perubahan teknologi. Dalam hal ini teknologi dianggap tetap dan modal adalah barang-barang yang diproduksi dengan daya tahan lama untuk digunakan membuat barang-barang baru.

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan.

3. Teori Solow-Swan

Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta kemajuan teknologi. Model Neoklasik Solow-Swan secara umum berbentuk fungsi produksi, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L).

Menurut teori ini rasio modal-*output* dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, untuk menghasilkan sejumlah *output* tertentu dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Jika lebih banyak modal yang digunakan tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dan sebaliknya. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan *output* tertentu.

Model Solow-Swan selalu mengasumsikan hubungan antara modal dan tenaga kerja serta *output* barang dan jasa. Namun model ini bisa dimodifikasikan untuk memasukkan kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen. Menurut Gregory Mankiw, menjelaskan bahwa efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat.

4. Teori Pertumbuhan Schumpeter

Menurut Schumpeter pertumbuhan ekonomi adalah penambahan *output* (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertumbuhan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi. Terdapat banyak rumus yang dipergunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pada umumnya yang paling sering digunakan adalah dengan metode hitung atau aritmatik, yaitu menghitung menghitung

pertumbuhan PDB atau GNP (perkapita) dari tahun ke tahun. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Ggnp = \frac{GNP_n - GNP_{n-1}}{GNP_{n-1}} \times 100\%$$

Ggnp adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, GNP_n adalah GNP tahun berikutnya, dan GNP_{n-1} adalah GNP tahun lalu. Adapun kebaikan menggunakan rumus ini adalah dapat menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya.

2.1.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diukur oleh dua indikator utama, yaitu PDB untuk ruang lingkup nasional dan PDRB untuk ruang lingkup regional. Kedua indikator ini merupakan kunci dari perkembangan ekonomi suatu Negara. Produk Domestik suatu wilayah merupakan nilai seluruh produk dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut atau tidak. Pendapatan yang timbul oleh adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah domestik atau region adalah meliputi wilayah yang berada di dalam wilayah geografis tersebut.

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah produk domestik bruto (PDB) yang nilainya di hitung berdasarkan indeks harga yang berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah produk domestik bruto (PDB) yang nilainya dihitung berdasarkan indeks harga yang berlaku pada tahun tertentu

yang dijadikan sebagai tahun dasar. Pendapatan Regional dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Sedangkan metode tidak langsung adalah perhitungan dengan mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional memakai berbagai macam indikator, antara lain jumlah produksi, jumlah penduduk, luas areal sebagai alokatornya.

Menurut Tarigan (2005: 24) Ada tiga pendekatan untuk menghitung pendapatan regional dengan menggunakan metode langsung yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang di produksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto sector atau sub sector tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sector/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara (intermediate) yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakaidalam proses produksi. Sektor jasa yang menerima pembayaran atas jasa yang diberikan (sesuai dengan harga pasar) masih bisa dihitung dengan pendekatan produksi. Akan tetapi akan lebih mudah apabila dihitung dengan pendekatan pendapatan. Jika perhitungan akurat maka kedua pendekatan itu semestinya memberikan hasil yang sama. Nilai tambah itu sama dengan balas jasa atas ikut sertanya berbagai faktor produksi dalam proses produksi.

2. Pendekatan pendapatan

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara (intermediate) yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakaidalam proses produksi. Sektor jasa yang menerima pembayaran atas jasa yang diberikan (sesuai dengan harga pasar) masih bisa dihitung dengan pendekatan produksi. Akan tetapi akan lebih mudah apabila dihitung dengan pendekatan pendapatan. Jika perhitungan akurat maka kedua pendekatan itu semestinya memberikan hasil yang sama. Nilai tambah itu sama dengan balas jasa atas ikut sertanya berbagai faktor produksi dalam proses produksi

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Kalu dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk:

- a. Konsumsi rumah tangga,
- b. Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung,
- c. Konsumsi pemerintah,
- d. Pembentukan modal tetap bruto (investasi),
- e. Perubahan stok, dan
- f. Ekspor neto.

Sedangkan, Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu, Menurut Tarigan (2005:25) alokator yang dapat digunakan, yaitu:

1. Nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor, pada wilayah yang dialokasikan,
2. Jumlah produksi fisik,
3. Tenaga kerja,
4. Penduduk, dan
5. Alokator tidak langsung lainnya.

2.1.2 Investasi

2.1.2.1 Pengertian Investasi

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2013:121).

Bagi suatu Negara Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan *output*, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. Penanaman modal swasta di Indonesia sudah dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal untuk kebutuhan dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi

ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Undang-Undang ini sebagai revisi perubahan dari UU.No.11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah tidak sesuai dengan percepatan perekonomian dan perkembangan hukum nasional. Khususnya di bidang penanaman modal. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, penanaman modal swasta dapat dibagi menjadi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Menurut Sukirno (2005) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- 1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja,
- 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stok kapital (Eni Setyowati dan Siti Fatimah N: 2007).

2.1.2.2 Teori Investasi

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

1. Teori Neo Klasik

Teori Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja (Arsyad, 2010: 88-89).

2. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa barikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007: 256-257).

2.1.2.3 Jenis-jenis Investasi

1. Autonomous Investment.

Investasi ini dilakukan oleh pemerintah (*public investment*), karena di samping biayanya sangat besar juga investasi ini tidak memberikan keuntungan, maka swasta tidak akan sanggup melakukan investasi jenis ini karena tidak memberikan keuntungan secara langsung.

2. Induced Investment.

Investasi ini timbul akibat adanya pertambahan permintaan efektif yang terjadi di pasar, dimana kenaikan permintaan efektif ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Gross Investment dan Net Investment.

Gross Investment adalah total seluruh investasi yang diadakan atau dilaksanakan pada suatu waktu. *Net Investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.

4. Domestic Investment dan Foreign Investment.

Domestic Investment adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan *Foreign Investment* adalah penanaman modal asing.

2.1.3 Investasi Modal Asing atau Penanaman Modal Asing

2.1.3.1 Pengertian Investasi Modal Asing atau Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing diyakini menjadi salah satu sumber penting pembiayaan bagi negara Indonesia. Di Indonesia Penanaman Modal Asing diatur Undang-Undang Tahun 2007. Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang ini yaitu aktivitas

menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanaman modal dalam negeri (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Pengertian modal asing dalam undang-undang tersebut (Jufrida, 2016), yaitu sebagai berikut:

1. Alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang mendapat persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru dari orang asing dan bahan-bahan yang di masukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini keuntungan yang dikenakan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu:

1. Investasi Portofolio: Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru.
2. Investasi Langsung: Penanaman modal asing (PMA) atau *Foreign direct investment* (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang

permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.

2.1.3.2 Faktor yang mempengaruhi Investasi Modal Asing atau Penanaman Modal Asing

Menurut Nanga (2001), faktor-faktor yang menentukan Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut:

1. Tingkat suku bunga, terdapat hubungan negatif antara jumlah investasi dan tingkat bunga. Jika tingkat suku bunga naik maka investasi akan berkurang sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah maka orang akan menanamkan investasi diberbagai bidang usaha.
2. Inovasi dan teknologi, perusahaan perlu menanamkan investasi untuk membeli mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang lebih canggih.
3. Tingkat perekonomian, semakin banyak aktivitas perekonomian maka semakin besar pendapatan nasional, dan semakin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung, kemudian akan diinvestasikan pada usaha yang menguntungkan.
4. Ramalan atau harapan orang tentang perekonomian dimasa datang, jika orang meramal perekonomian dimasa yang akan datang, orang akan giat melakukan investasi sekarang.
5. Tingkat keuntungan perusahaan, semakin besar tingkat keuntungan perusahaan maka semakin banyak laba yang dapat ditahan (*retained earnings*) dan bagian laba yang ditahan ini dapat digunakan untuk tujuan investasi.
6. Situasi politik, jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan maka tingkat investasi akan tinggi.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak banyak memberikan kemudahan bagi perusahaan banyak menghadapi birokrasi yang berbelit-belit maka tingkat investasi akan rendah.

2.1.4 Tenaga Kerja

2.1.4.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003:57).

Tenaga kerja (*manpower*) terdiri atas dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labour force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja (*unlabour force*) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar/mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang

atau penduduk yang sudah berusia 10 tahun keatas tergolong tenaga kerja. BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (*employed*), yaitu:

1. Tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas;
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu; dan
3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja $0 > 1$ jam perminggu.

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja.

Menurut Sumarsono (2013) pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja, tenaga kerja dan perantara atau pihak

ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan.

1. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Permintaan tenaga kerja ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan hasil output.

2. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak. Keputusan ini tergantung pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah digunakan untuk bekerja, apakah digunakan untuk kegiatan yang lebih santai (tidak produktif tetapi konsumtif), atau merupakan kombinasi keduanya.

2.1.4.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang di tentukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan, yaitu:

a. Berdasarkan Penduduknya

1) Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang

Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2) Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan Batas Kerja

1) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2) Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

c. Berdasarkan Kualitasnya

1) Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2) Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3) Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Menurut Payaman dalam A. Hamzah (2007:26), pada dasarnya ketenagakerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu tenaga kerja terdidik (*skill labour*), tenaga kerja terlatih (*trainer labour*), dan tenaga kerja tidak terlatih (*unskill labour*).

1. Tenaga Kerja Terdidik (*Skill Labour*)

Tenaga kerja terdidik (*skill labour*) adalah tenaga kerja yang pernah memperoleh Pendidikan formal dalam bidang tertentu tetapi mereka belum pernah dilatih dalam bidang tersebut.

Tenaga kerja terdidik diidentikkan dengan tenaga kerja yang belum berpengalaman. Keuntungan di dalam memilih tenaga kerja yang belum berpengalaman ini di antaranya yaitu:

- a) Tenaga kerja yang belum berpengalaman relative lebih murah harganya karena tidak mempunyai kekuatan posisi tawar yang tinggi terhadap balas jasa atau upah yang diinginkan.

- b) Tenaga kerja yang belum berpengalaman relative banyak tersedia di masyarakat sehingga perusahaan akan lebih leluasa memilih tenaga kerja yang dianggap memenuhi persyaratan dan berpotensi untuk bisa ikut memajukan perusahaan.
- c) Tenaga kerja yang belum berpengalaman lebih mudah untuk dibentuk dan diarahkan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Sedangkan kelemahannya yaitu:

- a) Perusahaan harus merencanakan membuat program pelatihan tertentu kepada tenaga kerja yang belum berpengalaman agar benar-benar terampil dan menguasai di bidangnya.
- b) Perusahaan harus rela mengeluarkan sejumlah uang guna membiayai jalannya program pelatihan yang direncanakan.
- c) Untuk menjadikan tenaga kerja terdidik menjadi terlatih memerlukan proses waktu yang lama sehingga hasil yang dicapai oleh perusahaan tentu tidak seperti ketika merekrut tenaga kerja terlatih.

2. Tenaga Kerja Terlatih (*Trainer Labour*)

Yang dimaksud dengan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah bekerja dan pernah mengikuti latihan sesuai dengan bidangnya, misalnya seseorang yang telah menamatkan studinya dalam bidang akuntansi, maka mereka dapat digolongkan sebagai tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini dapat disamakan dengan tenaga kerja yang sudah berpengalaman.

Keuntungan dalam tenaga kerja terlatih ini yaitu sebagai berikut:

- a) Tenaga kerja yang sudah berpengalaman mempunyai tingkat produktivitas tinggi sehingga dapat secara langsung memberikan sumbangan yang besar bagi perusahaan.
- b) Tenaga kerja yang sudah berpengalaman ini tidak memerlukan pelatihan khusus dan hanya memerlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sehingga perusahaan tidak perlu membuat program pelatihan seperti yang terjadi pada tenaga kerja yang belum berpengalaman.
- c) Sebagai akibat perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya untuk pelatihan khusus bagi tenaga kerja yang sudah berpengalaman tersebut.

Sedangkan kelemahannya yaitu:

- a) Tenaga kerja yang sudah berpengalaman ini pada dasarnya lebih sulit diperoleh atau didapat karena jumlahnya tidak banyak.
- b) Tenaga kerja yang sudah berpengalaman mempunyai daya tawar tinggi terhadap balas jasa atau upah yang diinginkan. Dengan demikian untuk mendapatkannya perusahaan harus siap memberikan imbalan yang cukup besar.
- c) Tenaga kerja yang sudah berpengalaman pada umumnya sudah terbentuk karakternya dan sudah jadi sehingga jika terjadi ketidaksesuaian dengan keinginan perusahaan biasanya sulit untuk diarahkan dan dibelokkan.

3. Tenaga Kerja Tidak Terlatih (*Unskill Labour*)

Yang dimaksud tenaga kerja tidak terlatih adalah tenaga kerja di luar tenaga kerja terdidik dan juga tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih ini merupakan bagian terbesar dari seluruh tenaga kerja yang ada.

Mereka umumnya hanya mengenyam Pendidikan formal pada tataran tingkat bawah dan tidak mempunyai keahlian yang memadai karena memang belum ada pengalaman kerja, sehingga pekerjaan yang dikerjakannyapun umumnya tidak memerlukan keahlian secara spesifik. Misalnya, seorang pelajar (Tingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Atas) *drop out*, maka mereka dapat digolongkan pada tenaga kerja tidak terlatih.

Keuntungan dari tenaga kerja tidak terlatih yaitu,

- a) Tenaga kerja yang tidak terlatih ini sangat murah harganya karena di samping tidak mempunyai Pendidikan formal tingkat tinggi juga keterampilan yang dimiliki tidak ada. Dengan demikian posisi kekuatan tawar-menawar menjadi sangat lemah disbanding dengan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih.
- b) Tenaga kerja yang tidak terlatih ini paling banyak tersedia di masyarakat, bahkan melebihi dari kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga perusahaan akan sangat leluasa sekali untuk memilih tenaga kerja yang dianggap benar-bener memenuhi persyaratan dan berkomitmen untuk ikut mengembangkan perusahaan.
- c) Tenaga kerja yang tidak terlatih ini sangat mudah untuk diarahkan sesuai tujuan perusahaan.

Sedangkan kelemahannya ialah:

- a) Tenaga kerja yang tidak terlatih ini hanya dapat menjalankan pekerjaan yang bersifat umum dan tidak memerlukan keahlian.
- b) Tenaga kerja yang tidak terlatih ini hanya dapat menjalankan pekerjaan yang bersifat rutin dan umumnya tingkat inisiatif daya kreativitasnya rendah sehingga

bila terjadi kendala di lapangan mereka akan merasa kesulitan untuk mencari jalan keluarnya.

- c) Tenaga kerja tidak terlatih ini kurang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga perlu pengawasan yang lebih teratur dari pihak perusahaan.

2.1.4.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Di Negara sedang berkembang masalah pengangguran masih menjadi masalah terbesar dalam perekonomian bangsa. Masalah pengangguran merupakan masalah yang akan dapat mempengaruhi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. Dalam hal ini, pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi masalah pengangguran. Selain itu, mengadakan pelatihan-pelatihan di upayakan masyarakat bisa mampu menciptakan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Todaro (2000) Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Sedangkan menurut Kuncoro (2002) Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Menurut Arsyad (2009:98), dalam ilmu ekonomi seperti yang kita ketahui faktor-faktor produksi adalah tanah, modal, tenaga kerja, *skill* (keahlian). Salah satu faktor tenaga kerja tersebut yang benar sesuai dengan kebutuhan dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki agar tenaga kerja yang dimiliki dalam sektor industri. Modal utama yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia (SDM).

Banyak tenaga kerja yang tersedia tetapi tidak dapat diserap oleh industri hal ini dikarenakan keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, di sinilah perlunya peranan pemerintah untuk melakukan pendidikan atau pelatihan terhadap tenaga kerja agar memiliki skill yang dibutuhkan oleh industri.

Mengingat kesempatan kerja yang terbatas tersebut maka pemerintah mengupayakan penciptaan lapangan kerja yang nantinya dapat menampung maupun mengurangi tingkat pengangguran yang berada di tengah masyarakat melalui penciptaan usaha usaha industri kecil.

Semakin bertambahnya jumlah industri kecil akan membawa dampak sangat luas terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan sumber daya manusia yang terbatas tentunya akan menghambat pengembangan itu sendiri, merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama sama dengan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta berpartisipasi menunjang program pemerintah pada peningkatan taraf hidup yang lebih adil dan merata, lalu pemerintah memberikan bantuan dan penyuluhan.

2.1.5 Kemiskinan

2.1.5.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup secara ekonomi masyarakat disuatu daerah. Fenomena ini biasa terjadi kerana rendahnya pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Rendahnya penghasilan akan menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup seperti standar kesehatan dan pendidikan. Masalah kemiskinan sangat sering terjadi di beberapa Negara yang sedang berkembang dengan tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmeratanya kesejahteraan masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial antar masyarakat.

Secara singkat kemiskinan Menurut Suparlan (1984:26) dapat di definisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Saldanha (1998:10) persoalan kemiskinan mengandung masalah pokok di antaranya yaitu:

1. Masalah kemiskinan adalah kerentanan. Pembangunan infastruktur ekonomi dan pertanian dapat saja meningkatkan pendapatan petani dalam jumlah besar yang memadai, akan tetapi kekeringan musim dua tahun berturut-turut akan dapat menurunkan tingkat hidupnya sampai titik yang terendah.

2. Kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, ketidakberdayaan menghadapi penyakit, kematian, kekumuhan dan kekotoran.
3. Kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau sebagian terbesar penghasilannya untuk konsumsi gizi mereka yang sangat rendah yang mengakibatkan produktivitas mereka rendah.
4. Kemiskinan juga ditandai oleh tingginya rasio ketergantungan, karena besarnya keluarga dan beberapa diantaranya masih balita. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya konsumsi yang akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka sehingga di dalam kompetisi merebut peluang dan sumber dalam masyarakat, anak-anak kaum miskin akan berada pada pihak yang lemah.

Menurut Sumodiningrat (1998:8) kalsifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut selain dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga di tentukan oleh tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan Pendidikan.

b. Kemiskinan Relatif

Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah di bandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Penekanan dalam kemiskinan relatif adalah adanya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal dengan istilah ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif untuk menunjukan ketimpangan pendapatan berguna untuk mengukur ketimpangan pada suatu wilayah. Kemiskinan relatif juga dapat di gunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah yang dilakukan pada suatu wilayah tertentu. Pengukuran relatif di ukur berdasarkan tingkat pendapatan, ketimpangan sumber daya alam serta sumber daya manusia yaitu kualitas Pendidikan, kesehatan serta perumahan.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Alfian, dkk mendefinisikan kemiskinan structural “sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman sehat, kekurangan Pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya. Kemiskinan struktural juga dapat diukur dari kurangnya perlindungan dari hokum dan pemerintah sebagai birokrasi atau peraturan resmi yang mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada”.

d. Kemiskinan Kronis

Kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif.
- 2) Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasikan (daerah daerah kritis sumber daya alam dan daerah terpencil).
- 3) Rendahnya Pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.

e. Kemiskinan sementara

Kemiskinan sementara terjadi akibat adanya sementara hal yaitu:

1. Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi
2. Perubahan yang bersifat musiman
3. Bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

2.1.5.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut Mudarajad (2006:120) secara mikro Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kemiskinan juga muncul akibat perbedaan sumber daya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas rendah sehingga upahnya rendah. Menurut Setyawa (2001:113) ada beberapa sebab terjadinya kemiskinan dinegara sedang berkembang , salah satunya adalah faktor

ketidakberuntungan. Faktor ketidakberuntungan ini merupakan bagian dari pendekatan *integratedpoverty* atau kemiskinan terpadu, yang dikemukakan oleh Chambers. Menurut Chambers ada lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin, kelima adalah: Kemiskinan, fisik yang lemah, kerentanan, keterisolasian dan ketidak berdayaan.

Menurut mudrajat Kuncoro, (2006:125) terdapat tiga penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi antara lain:

1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat pendapatan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah Pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan muncul karena pendapataan akses dalam modal, bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketersediaan akses manusia mempunyai keterbatasan dalam memilih.

2.1.5.3 Dampak Kemiskinan

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan ialah sebagai berikut:

- 1) Angka putus sekolah tinggi karena mahalnya biaya Pendidikan.
- 2) Kesehatan sulit didapat karena kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi.
- 3) Kriminalitas muncul akibat dari sulitnya memenuhi kebutuhan gizi.

- 4) Jumlah orang menganggur bertambah.
- 5) Buruknya generasi penerus.
- 6) Munculnya Konflik di masyarakat.
- 7) Mobilitas sosial rendah.

2.1.5.4 Teori Kemiskinan

Teori-teori yang digunakan antara lain adalah: Menurut Todaro (2000:18) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di Negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan
2. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan
3. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya.
4. Perbedaan peranan sektor industri
5. Perbedaan struktur industri
6. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan.

Sedangkan menurut Jhingan, mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus kemiskinan, *Pertama*, prasarana dan sarana politik sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf keterampilan ataupun keahlian, *Kedua*, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. *Ketiga*, penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman. Usang dan ketinggalan zaman. Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan

utama pembangunan ekonomi. Pembentukan modal dinegara-negara sedang berkembang merupakan “*vicious cyle*” (lingkaran yang tidak berujung pangkal).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dilakukan penulis mengenai “Analisis Pengaruh Investasi Modal Asing, Tenaga Kerja dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2005-2021”. Penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Amita Prameswari, Sri Muljaningsih dan Kiki Asmara. Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Jurnal ekonomi Pembangunan, Vol. 7 No. 2, 2021.	Kemiskinan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi,	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Hubungan dan pengaruh Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan. Hubungan dan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan tidak signifikan. Hubungan dan pengaruh Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.
2.	Fahmi Rasjid, Vecky A. J. Masinambow dan Audie O. Niode. Analisis Pengaruh Belanja Modal Negara, Tenaga Kerja, Penanaman Modal	Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Modal Negara, Penanaman Modal Dalam Negeri.	Hubungan dan pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Vol. 9 No 1, 2021 ISSN: 2303-1174.</p>			<p>Hubungan dan pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.</p> <p>Hubungan dan pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan tidak signifikan.</p> <p>Hubungan dan pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan tidak signifikan.</p>
3.	<p>Gustinus Marianus Tahu. Analisis Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 6 No. 2, 2021.</p>	<p>Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan</p>	<p>Pengeluaran Pemerintah</p>	<p>Hubungan dan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.</p> <p>Hubungan dan pengaruh pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Hubungan dan pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan tidak signifikan.
4.	Yesika Resianna Barimbing dan Ni Luh Karmini. Pengaruh PAD, Tenaga Kerja dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, Vol. 4 No 5, 2015 ISSN: 2303-0178.	Tenaga Kerja, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi	PAD	Hubungan dan pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan. Hubungan dan pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan. Hubungan dan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.
5.	Anak Agung Istri Diah Paramita dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. Pengaruh Investasi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan	Pengangguran	Hubungan dan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan. Hubungan dan pengaruh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, Vol. 4 No. 10, 2015 ISSN: 2303-0178.			pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif signifikan. Hubungan dan pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif tidak signifikan.
6.	Putu Novi Cahya Ningrum dan I Gusti Bagus Indraajaya. Pengaruh Pendidikan Penanaman Modal Asing, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, Vol. 7 No. 2, 2018 ISSN: 2303-0178.	Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi	Pendidikan	Hubungan dan pengaruh Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan. Hubungan dan pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan
7	Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1 No. 3, 2019.	Investasi Asing, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi	Investasi Dalam Negeri, Infrastruktur	Hubungan dan pengaruh investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Hubungan dan pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.</p>
				<p>Hubungan dan pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.</p>
				<p>Hubungan dan pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.</p>
8.	<p>Ely Kusuma Retno. Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi . Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol 1 No, 3. 2013.</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan</p>	<p>Pendidikan</p>	<p>Hubungan dan pengaruh antara Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.</p> <p>Hubungan dan pengaruh antara kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan tidak signifikan.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad dan Muhammad Nasir. Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 2 No. 1, 2016.	Investasi Asing Langsung (FDI), Pertumbuhan Ekonomi	Investasi Dalam Negeri	Hubungan dan pengaruh Investasi Asing Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan tidak signifikan. Hubungan dan pengaruh investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.
10.	Rahmat Imanto, Maya Panorama, Rinol Sumantri. Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11, No. 2, 2020 ISSN: 2087- 2178.	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi	Pengangguran	Hubungan dan pengaruh Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan. Hubungan dan pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan tidak signifikan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Investasi Modal Asing dengan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi

suatu wilayah. Dalam teori Harrod-Domar dijelaskan bahwa adanya investasi merupakan kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dalam setiap periodenya dibutuhkan adanya tambahan investasi sebagai stok modal.

Menurut Makmum dan Yasin (2003), Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. Sehingga hubungan investasi modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Rasjid, Vecky A. J. Masinambow dan Audie O. Niode (2021) menyatakan bahwa investasi modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini serupa dengan penelitian yang dihasilkan oleh Putu Novi Cahya Ningrum dan I Gusti Bagus Indrajaya (2018) yang menyatakan bahwa investasi modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Hubungan Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi

Tenaga kerja dalam pembangunan nasional dikatakan faktor penting yang mampu menentukan laju pertumbuhan perekonomian. Menurut Subri (2003) ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja sehingga mampu memperlambat laju pertumbuhan perekonomian. Tenaga kerja juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar.

Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000:112) pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi. Sehingga hubungan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi adalah positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Yesika Resianna Barimbing dan Ni Luh Karmini (2015) menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini serupa dengan penelitian yang dihasilkan oleh Tevi Mahriza dan Syamsul Amar B (2019) yang menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

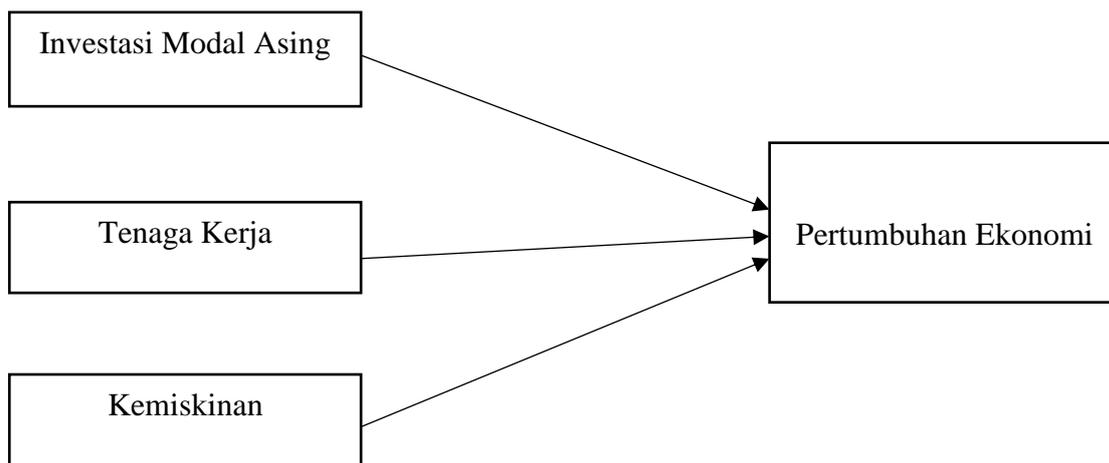
2.2.3 Hubungan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan negara. Mencapai pembangunan, setiap negara akan berusaha keras untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang mengiringi tercapainya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut (Jonaidi, 2012). Sedangkan menurut Kuznets (dalam Suparmoko: 2004), menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang negatif. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan pemerataan pendapatan tidak akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk itu perlu adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan sehingga dapat mensejahterakan

masyarakat (Sumarto, 2012). Sehingga hubungan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh, Gustinus Marianus Tahu (2021) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini serupa dengan, Rahmat Imanto, Maya Panorama, Rinol Sumantri (2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara skematis pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian terhadap penelitian terdahulu tentang Pertumbuhan Ekonomi, maka dalam penelitian akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial investasi modal asing dan tenaga kerja berpengaruh positif, sedangkan kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2005-2021.

2. Diduga secara bersama-sama investasi modal asing, tenaga kerja dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2005-2021